

REFLEKSI 95 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL:  
PERLUNYA KESADARAN RAKYAT MENUJU INDONESIA  
MANDIRI\*

Oleh:

Singgih Tri Sulistiyono

**I. Pendahuluan**

Mungkin masih terlekat dalam benak kita, bagaimana pada tahun-tahun terakhir menjelang kejatuhannya, Presiden Suharto pernah mencanangkan gerakan Kebangkitan Nasional II. Ada beberapa isu penting yang bisa ditangkap dari fenomena itu. *Pertama*, jelas bahwa ia ingin memompa kembali semangat kebangsaan yang di sana-sini mulai menghadapi gejala apatisme dan frustrasi sebagai akibat dari kerapuhan-kerapuhan dalam pembangunan ekonomi dan politik selama pemerintahan yang dipimpinnya. Dengan cara begitu ia ingin memancing dukungan yang lebih kuat dari semua elemen bangsa. *Kedua*, apa yang secara implisit bisa ditangkap dari pencanangan itu adalah bahwa Suharto ingin membangun image untuk menycejajarkan dirinya dengan dr. Sutomo, seorang tokoh yang dipandang sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional.

Apapun penyebabnya, apa yang pernah dilontarkan oleh Suharto itu ternyata hanya menjamah tataran retorika saja, tidak pernah sampai menembus pada tataran substansi dari kehidupan rakyat. Gaung itu mungkin hanya bergetar di kalangan pejabat birokrasi, meskipun getaran-getaran itu hanya menimbulkan kelatahan yang kosong makna. Isu itu tidak pernah betul-betul mencerminkan suatu kebangkitan tertentu dalam kehidupan berbangsa. Pertanyaannya adalah mengapa seruan untuk bangkit secara nasional ini tidak memiliki dampak terhadap kehidupan berbangsa? Bahkan beberapa tahun setelah pencanangan itu Suharto sendiri dipaksa lengser dari kursi kepresidenan oleh rakyat dengan cara yang memalukan. Apakah ada yang salah dari kondisi dan dan cara berpikir rakyat Indonesia sehingga sulit diajak melakukan manufer kebangkitan nasional (setidak-tidaknya a la Suharto) dalam rangka untuk melakukar loncatan-loncatan historis untuk mencapai perkembangan yang spektakuler sebagaimana yang terjadi pada awal abad XX? Untuk itu makalah ini akan menggambarkan beberapa hal: *pertama*, sketsa perkembangan pergerakan nasional dari skala etnisitas ke arah kerakyatan (*populist*) dan kebangsaan (*nationality*); *kedua*, kondisi struktural masyarakat Indonesia pada masa kebangkitan nasional; dan *ketiga*, makna kebangkitan nasional untuk Indonesia kini dan masa yang akan datang.

---

\* Makalah disampaikan pada Diskusi Bersama, Refleksi Pergerakan 20 Mei 1908, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Fak. Sastra Universitas Diponegoro, Semarang; 28 Mei 2003.

## II. Dari ethno-nation ke nation-state: Sketsa awal perkembangan pergerakan nasional

Bagi negara-negara bekas koloni di mana batas-batas wilayah kedaulatan negara dipaksakan begitu saja oleh negara kolonial yang mewariskannya tanpa kompromi terlebih dahulu dengan penduduk setempat, dan pemerintahan nasional yang baru merdeka itu tidak memiliki cukup kesempatan untuk mengatur administrasi daerah sesuai dengan kehendak kelompok etnik yang berbeda-beda, maka persoalan kebangsaan dan integrasi bangsa menjadi masalah yang sangat penting. Apalagi jika negara yang baru melakukan dekolonisasi itu merupakan negara yang besar yang di dalamnya terdapat keanekaragaman baik dari segi kewilayahan, ras maupun dari segi kultural.

Persoalan formasi bangsa juga dihadapi oleh Indonesia yang merupakan bekas koloni Belanda yang memiliki wilayah yang sangat luas yaitu sekitar 587.000 km<sup>2</sup>; jarak dari barat ke timur lebih panjang dari pada jarak antara London dan Siberia.<sup>1</sup> Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar dan kecil. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau besar seperti Sumatra, Java, sekitar tiga perempat Borneo, Sulawesi, kepulauan Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan separoh bagian barat dari pulau Papua dan dihuni oleh ratusan suku bangsa.<sup>2</sup> Pulau-pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km.<sup>3</sup> Di dalam daerah yang demikian luas ini terkandung keanekaragaman etnik, ras dan kultural sehingga diperlukan jalan yang berliku-liku dalam proses formasi bangsa:

Pada tahap awal, embrio kesadaran kebangsaan masih banyak diwarnai oleh perasaan etnisitas atau kesukuan yang tinggi. Budi Utomo sendiri yang dianggap sebagai organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia misalnya, pada awalnya lebih memiliki perhatian pada etnik Jawa (dan Madura). Demikian juga para pemuda, yang secara umum memiliki semangat pembaharuan dan revolusioner, pada waktu itu juga masih terkotak-kotak dalam organisasi yang berbasiskan etnik dan kedaerahan dan ikatan primordial lain seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamiten Bond, dll. Perasaan kesukuan dan kedaerahan serta keagamaan ini pula yang menjadi salah satu penyebab

<sup>1</sup> Drake, C. Drake, *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989) 16.

<sup>2</sup> A.S. Walcott, *Java and her neighbors: A traveler's note in Java, Celebes, the Moluccas and Sumatra* (New York and London: Knickerbocker Press, 1914) 1. Lihat juga Koninklijke Paketvaart Maatschappij, *KPM: Official yearbook 1837-1938* (Batavia: De Unie, 1938) 37. Lihat juga S. Ali, 'Inter-Island shipping', *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 3 (1966) 27.

<sup>3</sup> T.H. Purwaka, *Indonesian Intersland shipping: An assessment of the relationship of government policies and quality of shipping services* (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989) 3-5.

gagalnya Kongres Pemuda I.<sup>4</sup> Prasangka kesukuan masih cukup mewarnai wacana interaksi sosial di antara kelompok pada waktu itu. Barangkali apa yang dibayangkan oleh sebagian dari para pemuda pada waktu itu adalah bukan nation-state sebagaimana yang kemudian terbentuk, tetapi lebih mendekati kepada konsep ethno-nation yaitu kebangsaan yang dibangun atas kesamaan etnik.<sup>5</sup>

Pada tahap berikutnya, corak internasionalisme dan kerakyatan cukup menonjol. Seperti diketahui bahwa kebangkitan Indonesia pada awalnya tidak hanya diwarnai oleh kesadaran etnis dan lokalitas, tetapi juga bersumber dari ideologi keagamaan (yang merupakan paham yang bersifat internasionalisme) yaitu Islam yang semenjak berabad-abad menjadi kekuatan anti penjajahan. Oleh karena imperialisme dan kolonialisme merupakan sistem universal yang menimbulkan penindasan di daerah-daerah koloni, maka Islam dijadikan sebagai alat propaganda untuk membebaskan rakyat dari sistem ini. Pada masyarakat terjajah, Islam menjadi ideologi yang populis dan memperjuangkan kepentingan hidup rakyat. Oleh karena itu seringkali Islam diidentikan dengan pribumi dan rakyat yang tertindas itu sendiri.

Sifat sebagaimana yang digambarkan di atas dapat dijumpai pada organisasi Sarekat Islam (SI). Pada awalnya SI merupakan suatu gerakan kaum menengah Islam yang menentang dominasi kaum pedagang Cina dan politik 'kristenisasi'. Namun demikian dalam proses selanjutnya SI berkembang menjadi gerakan kerakyatan yang membela kaum pribumi yang mayoritas Islam dari penindasan kolonialisme. Proses radikalisasi SI terjadi sejalan dengan interaksi ideologis antara Islamisme dan komunisme. Banyak tokoh SI yang memiliki simpati dengan metode perjuangan kelas ala komunis menjadi tokoh-tokoh kerakyatan yang radikal bukan hanya dalam melawan kolonialisme tetapi juga feodalisme yang juga dipandang memiliki sifat menindas rakyat.<sup>6</sup> Oleh karena itu perpecahan di dalam tubuh SI tidak bisa dihindarkan, sebab pada kenyataannya banyak para kyai atau haji masih melaksanakan praktek-praktek ekonomi yang dipandang memberatkan rakyat seperti praktek renténir. Kelompok semacam ini menjadi bagian dari target perjuangan dari gerakan rakyat. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu pendorong perpecahan dalam tubuh SI, yaitu SI Putih yang anti komunis dan SI Merah yang kemudian menjadi tenaga inti dari Partai Komunis Indonesia. Setelah anasir-anasir kiri yang radikal keluar dari SI, maka

<sup>4</sup> J.D. Legge, *Indonesia* (Sydney: Prentice-Hall, 1977), hlm. 120-145.

<sup>5</sup> Mengenai hal ini lihat misalnya, Leonard Y. Andaya, "Ethnonation, nation-state and regionalism in Southeast Asia", in *Proceeding of the International Symposium Southeast Asia: Global Area Studies for the 21<sup>st</sup> Century* (Organised by Project Team: "An Integrated Approach to Global Area Studies" supported by Monbuso's Grant - in - Aid for Scientific Research on Priority Areas and Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 18 - 22 October 1996.

<sup>6</sup> Seperti diketahui bahwa komunisme itu sendiri lahir sebagai 'anak durhaka' dari penindasan kapitalisme, sedangkan kolonialisme -yang sedang dihadapi oleh Islam di daerah koloni- merupakan cucu dari kapitalisme (kapitalisme melahirkan imperialisme dan imperialisme melahirkan kolonialisme).

organisasi ini kurang bisa lagi melakukan manuver-manuver gerakan rakyat yang radikal.

Setelah anasir-anasir kiri keluar dari SI, pemerintah kolonial tampaknya tidak lagi memandang organisasi massa Islam ini sebagai kekuatan yang paling dikhawatirkan. Titik perhatian utama lebih banyak ditujukan kepada gerakan komunisme di Hindia Belanda yang jelas-jelas anti kolonialisme dengan cara-cara yang radikal. Pada kenyataannya, pemerintah kolonial lebih takut dengan gerakan rakyat karena sifat-sifatnya yang radikal daripada dengan gerakan nasionalis yang seringkali masih bisa diajak kompromi. Pergerakan nasionalis, misalnya, tidak pernah mendapatkan penindasan yang begitu hebat dari pemerintah kolonial jika dibandingkan dengan perlakuan yang ditimpakan kepada aktivis PKI.

Munculnya organisasi pergerakan nasional yang berhaluan 'nasionalis Hindia' muncul setelah kelahiran organisasi yang berbasiskan etnik dan organisasi yang berasaskan keagamaan. Munculnya kesadaran 'nasional Hindia' sudah tentu berkaitan dengan semakin banyaknya kaum terpelajar yang lahir dari 'pendidikan kaum tertindas'. Dengan kemampuan dan kesempatan yang diperolehnya, mereka bisa mengikuti perkembangan kapitalisme dan kolonialisme yang sedang mengalami kekalutan. Mereka melihat bahwa nasionalisme yang akan melahirkan negara bangsa-lah yang akan mampu menggantikan kedudukan dan peran negara kolonial. Kemenangan Jepang atau Rusia juga cukup mengilhami kepada mereka bagaimana negara Asia mampu menjadi negara yang kuat.

Nasionalisme berhubungan dengan kesadaran sebagai suatu komunitas untuk hidup bersama dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Jadi nasionalisme tidak selalu terikat oleh ikatan ras atau kesukuan tetapi lebih terikat oleh kemauan untuk hidup bersama dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dalam sejarah Indonesia, kesadaran dan kemauan itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tahun-tahun pertama kebangkitan nasional menunjukkan bahwa unsur-unsur kesukuan (etnisitas) masih sangat menonjol. Bahkan hingga paroh pertama tahun 1920-an, sifat-sifat kesukuan dan kedaerahan masih menonjol. Baru pada bagian kedua tahun 1920-an problem etnisitas itu bisa diatasi dengan lebih baik dengan lahirnya kesepakatan yang tertuang dalam Sumpah Pemuda tahun 1928: bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini terlihat bagaimana perasaan ethno-nation menapak menjadi perasaan nation. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh organisasi nasionalis seperti Indische Partij dan PNI bukan hanya kemerdekaan etnik tertentu tetapi mencakup kemerdekaan rakyat Hindia yang sama-sama sedang terjajah.

Dengan demikian isu strategi perjuangan koperasi dan non-koperasi menjadi tidak relevan lagi karena paradigma perjuangan yang baru adalah kemerdekaan Indonesia. Wacana perdebatan dan polemik kebudayaan yang berkembang tahun 1930-an juga dalam kerangka paradigma itu, artinya kebudayaan yang bercorak bagaimanakah yang sesuai dengan negara

Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Selain itu perdebatan, dan bahkan konflik ideologis antara nasionalisme dan internasionalisme, antara Islamisme dan sekularisme juga semakin kentara sejak periode 1920-an. Namun demikian mereka memiliki dasar yang sama yaitu kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang

Unsur utama yang terkandung di dalam kesadaran berbangsa tersebut adalah keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu komunitas bangsa. Kesamaan nasib sebagai rakyat yang terjajah merupakan suatu ikatan kuat di antara etnik-etnik yang ada di Nusantara untuk menjalin suatu ikatan perjuangan, sedangkan keinginan untuk merajut masa depan yang lebih gemilang mendorong untuk membuat kesepakatan-kesepakatan sebagai manifestasi dari kesadaran nasional. Suatu hal yang luar biasa, sejalan dengan perkembangan situasi politik internasional, adalah bahwa kesadaran kebangsaan ini mencapai tingkatan tertinggi dengan dirumuskannya kesadaran ini ke dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan rumusan yang tegas mengenai perasaan senasib dan keinginan untuk membangun suatu negara bangsa (nation-state) yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dengan cara demokrasi.

### III. Lingkungan Historis Masyarakat Indonesia Masa Pergerakan Nasional

Untuk memahami dengan baik gejala historis apa yang disebut dengan pergerakan nasional maka perlu dipahami pula lingkungan sosio-historis masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dengan cara demikian maka kita akan lebih memahami kondisi masyarakat Indonesia beserta lingkungannya dan alam pikirannya yang telah melahirkan fenomena historis yang dipandang begitu besar oleh bangsa Indonesia dalam sejarahnya.

Seperti diketahui bahwa periode munculnya pergerakan nasional bersamaan dengan puncak perkembangan masyarakat kolonial yang telah diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam masyarakat kolonial itu posisi dan peranan masyarakat Indonesia dipinggirkan oleh kaum kolonialis. Dengan berbagai cara, kaum kolonialis menguasai kehidupan masyarakat Indonesia: intimidasi, mengadu domba, hingga invasi dan aneksasi. Bahkan kekuatan kolonial berusaha melanggengkan perampasan itu dengan menciptakan tata hukum yang mereka buat sehingga seolah-olah kehadiran mereka memiliki dasar legalitas. Dengan cara itu mereka mencoba untuk menciptakan masyarakat kolonial dengan semangat apartheid. Basis rasial digunakan untuk menciptakan hukum-hukum kolonial. Dalam pasal 109 dari Peraturan Pemerintah (*Regeeringsreglement*) tahun 1854 misalnya, diadakan pembedaan golongan antara 'Orang Eropa dan orang-orang yang dipersamakan' di satu pihak dan 'pribumi' di pihak lain. Pada awalnya kategori 'pribumi' mencakup orang-orang Cina, Arab, dan sebagainya, namun kemudian mereka dipisahkan menjadi kelompok sendiri dengan sebutan 'Timur Asing' yang menduduki kelas kedua setelah kelompok Eropa. Jadi kriteria etnik dan ras dijadikan dasar dari struktur hukum dalam

masyarakat kolonial Indonesia.<sup>7</sup> Jadi pada waktu itu masyarakat Indonesia memang sedang menghadapi ketidakadilan struktural yang -sengaja diciptakan oleh penguasa kolonial yang menempatkan rakyat pribumi pada posisi yang paling hina dalam struktur masyarakat kolonial. Secara kultural, kebijakan semacam ini telah menjadikan rakyat pribumi mengidap *minderwaardigheidscomplex*, semacam sindrom rendah diri yang kronis.<sup>8</sup>

Lingkungan historis lain yang cukup menyolok yang mengiringi muncul dan berkembangnya pergerakan nasional adalah proses penguatan negara kolonial secara politis. Pada waktu itu organisasi-organisasi pergerakan nasional dan masyarakat Indonesia sedang menghadapi hegemoni kekuasaan negara kolonial. Dalam lingkungan masyarakat kolonial, posisi rakyat dan negara cenderung berhadapan-hadapan secara frontal. Dengan demikian situasi konflik akan terus menjadi sesuatu yang laten dalam hubungan antara negara dan rakyat. Periode akhir kolonial menyaksikan bahwa kekuatan kolonial berusaha memperkuat posisi negara kolonial dan dengan demikian posisi rakyat terjajah semakin diperlemah. Seperti diketahui bahwa proses penguatan negara kolonial (*strengthening of the colonial state*) dimulai sejak awal abad XIX ketika terjadi proses birokratisasi negara kolonial di mana baik birokrasi Eropa maupun pribumi menjadi mesin pelaksana dari kebijaksanaan pemerintah pusat di Batavia (gubernur jenderal) ataupun Menteri Urusan jajahan di negeri Belanda.

Semakin menguatnya negara kolonial, khususnya di Jawa, juga bisa dilihat dari jumlah birokrat yang semakin bertambah. Meskipun jumlah pejabat tinggi tidak menunjukkan peningkatan yang menyolok antara tahun 1825-1890, namun peningkatan itu terjadi pada level pejabat perantara (yaitu tingkat asisten residen dan *controlleur*) dari 73 dalam tahun 1825 menjadi 190 dalam tahun 1890. Mereka memiliki posisi yang sangat sentral dalam birokrasi kolonial. Pejabat-pejabat ini yang secara langsung melakukan hubungan dengan bupati dan *wedono* ataupun lurah. Merekalah yang biasanya melakukan penekanan-penekanan terhadap pejabat pribumi untuk melaksanakan kebijaksanaan kolonial. Kekuatan negara kolonial pada waktu itu juga disokong oleh keberadaan tentara kolonial yang tangguh yang disebut KNIL (*Koninklijke Nederlands-Indisch Leger*). Pada tahun 1820 jumlah KNIL ada sekitar 10.000. Setelah Perang Diponegoro jumlah ini bertambah menjadi dua kali lipat. Pada tahun 1875 jumlah ini menjadi

---

<sup>7</sup> Lihat V.J.H. Houben, 'Java in the 19<sup>th</sup> Century: Consolidation of a Territorial State', dalam: Howard Dick dkk., *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 61.

<sup>8</sup> S.T. Sulistyono, 'Menggagas Paradigma Penulisan Sejarah Indonesia Pra-Kemerdekaan untuk Memperkuat Integrasi Nasional: Sebuah Pengantar Diskusi', Makalah disampaikan pada Seminar 'Menggagas Paradigma Baru dalam Penulisan dan Pengajaran Sejarah Indonesia', Kerjasama Jurusan Sejarah Fak. Sastra UNDIP - Sanggar Kebangsaan Indonesia - Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah. Semarang: 20 Mei 2003, hlm. 11.

30.000. KNIL menjadi pengawal yang ampuh bagi berjalannya birokrasi kolonial.<sup>9</sup>

Menguatnya negara kolonial berjalan seiring dengan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Bahkan bisa dikatakan bahwa penguatan negara kolonial itu sendiri diupayakan dalam rangka untuk melakukan ekspansi ekonomi. Jika di eropa terjadi perkembangan di mana negara memberikan kebebasan kepada rakyat / swasta maka sebaliknya di negeri koloni, pemerintah kolonial menerapkan kebijaksanaan yang intervensionis baik dalam politik maupun ekonomi. Dalam hubungan ini Jawa misalnya ditempatkan dalam posisi sebagai daerah eksploitasi (*wingewest*) yang mendatangkan keuntungan bagi negeri induk. Fungsi negeri jajahan hanya sebagai sapi perahan belaka, atau sebagai gabus yang membuat Nedeland masih terapung di atas laut.

Jadi jelas bahwa dalam masyarakat kolonial rakyat terjajah menghadapi penderitaan multidimensi: terhina secara kultural, terbelenggu secara politis, dan tereksploitasi secara ekonomi. Kemunculan Politik Etis pada awal abad XX yang secara retorika hendak ditujukan untuk 'membalas budi' rakyat jajahan dan menyejahterakannya, mungkin sebetulnya merupakan alat bagi negara kolonial untuk meneguhkan kembali kekuasaannya atas rakyat yang selama bagian kedua abad XIX banyak dituntun oleh kaum pemodal swasta. Dalam kerangka Etis ini, negaralah yang menentukan konsep kesejahteraan secara ekonomi dan penerapan konsep kesejahteraan secara politik dengan membangun persepsi politik bahwa rakyat sebagai kawulo dan pemerintah sebagai gustri yang 'berwenang' untuk menjadi *pangreh praja* (yang memerintah negara). Jadi dengan demikian, meskipun Politik Etis ini secara ekonomi mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi secara politis posisi rakyat menjadi semakin lemah. Apalagi retorika Etis di Jawa ini secara menggelikan diiringi dengan ekspansi dan penaklukan yang brutal atas daerah-daerah di luar Jawa seperti di Lombok, Bone, Aceh, Seram, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Pergerakan nasional bukan merupakan satu-satunya bentuk perlawanan terhadap dominasi kolonial di Indonesia. Anteseden kolonial itu sendiri sudah merupakan bagian dari tradisi resistensi dalam sejarah Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari perjuangan rakyat melawan kolonialisme baik sebelum maupun sesudah abad XX. Kita menyaksikan bagaimana sepanjang abad XIX banyak diwarnai oleh perlawanan rakyat baik dalam skala besar seperti Perang Pattimura, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, dan sebagainya maupun dalam skala kecil untuk

<sup>9</sup> Houben, 'Java in the 19<sup>th</sup> Century', 60.

<sup>10</sup> Lihat J.Th. Lindblad, 'The Outer Islands in the 19<sup>th</sup> Century: Contest for Periphery', dalam: Howard Dick dkk., *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 98. C. Lulofs, *Onze politiek tegenover de Buitenbezittingen* (Batavia: Van Dorp, 1908) 21-70. See also J. Th. Lindblad, 'De opkomst van de Buitengewesten', in: A.H.P. Clemens & J.Th. Lindblad (eds), *Het belang van de Buitengewesten: Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indië 1870-1942* (Amsterdam: NEHA, 1989) 1-6.

membebaskan belenggu penjajahan, menghapuskan perlakuan yang diskriminatif dan perampasan kemakmuran yang dilakukan oleh penguasa kolonial.<sup>11</sup> Namun demikian pergerakan nasional merupakan gejala baru yang muncul pada abad XIX. Di Indonesia sendiri nasionalisme ini mulai memunculkan diri dalam bentuk yang riil pada abad XX. Nasionalisme muncul sebagai bagian dari proses berlangsungnya wacana intelektual sebagai konsekuensi logis dari perkembangan pendidikan modern sejak akhir abad XIX.

Ada beberapa ciri yang menonjol dari munculnya pergerakan nasional di Indonesia. *Pertama*, bahwa perasaan anti-kolonial dan kadang-kadang sifat *xenophobia* yang sangat berlebihan. Bahkan mungkin sifat inilah yang mendorong perasaan kebangsaan. *Kedua*, bahwa peranan para perantau sangat besar dalam memupuk kesadaran kebangsaan. Mula-mula nasionalisme yang muncul di Hindia Belanda adalah nasionalisme perantauan, ketika orang-orang dari Sumatra, Ambon, Minahasa, Jawa saling mengadakan interaksi.

*Ketiga*, bahwa sifat kekotaan sangat menonjol dalam proses pembentukan bangsa. Hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa interaksi sosial antara etnik dan kelompok sosial yang berbeda banyak terjadi di kota-kota besar yang sejak masa pra-kolonial sudah menjadi pusat pertemuan berbagai etnik dan kelompok sosial untuk melakukan bisnis sebagai kegiatan utamanya. Dari sisi ini kota-kota ini berfungsi sebagai 'melting pot' bagi berbagai elemen sosial yang memungkinkan mereka saling mengenal, berinteraksi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk membina suatu kehidupan sebagai sebuah komunitas bangsa.<sup>12</sup> Jadi tampaknya penjajahan asing dan kesadaran sebagai rakyat yang terjajah telah mendorong suatu kebangkitan nasional. Di negeri jajahan, kolonialisme telah melahirkan nasionalisme.

#### IV. Kebangkitan Nasional: Antara Mithos dan Realitas

Tidak ada suatu komunitas termasuk sebuah bangsa yang dapat hidup dengan utuh tanpa adanya mitos, baik itu dalam masyarakat moder apalagi pada masyarakat tradisional. Mitos merupakan bagian yang esensial dari kehidupan sosial.<sup>13</sup> Salah satu fungsi mitos yang sangat penting adalah sebagai sarana untuk memberikan perasaan integrative kepada seluruh warga komunitas yang sewaktu-waktu akan selalu menghadapi kemungkinan terjadi disintegrasi. Oleh karena itu sering didapati bahwa mitos integrative sengaja diciptakan dalam rangka menjaga keutuhan suatu komunitas. Sudah barang tentu penciptaan mitos ini berkaitan erat dengan kepentingan aktual

<sup>11</sup> Tentang berbagai perlawanan petani dalam skala gerakan sosial lihat misalnya Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java* (Oxford, New York, Jakarta, Kuala Lumpur: Oxford University, 1978).

<sup>12</sup> Kesepakatan-kesepakatan yang merupakan manifestasi dari keniauan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa ini yang disebut sebagai nasionalisme. Lihat Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sedjarahnyanya* (Jakarta: Pustaka Sardjana: 1961), hlm. 12.

<sup>13</sup> Taufik Abdullah, *Nasionalisme dan Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2001), hlm. 25.



pada jamannya. Ketika Ken Arok dan kubunya menciptakan Pararaton akan jelas terlihat bagaimana upaya penguasa ini untuk menjaga agar rakyat tidak terpecah ke dalam kubu-kubu konflik yang timbul sebagai akibat dari konflik-konflik sosial-politik. Demikian juga mitos-mitos yang dikembangkan di dalam Babad Tanah Jawi jelas mengindikasikan kepentingan aktual untuk menjaga integrasi sosial dan politik pada jamannya. Pihak-pihak yang berkonflik akan menjadikan mitos sebagai referensi untuk melakukan rujuk sosial.

Pada jaman modern, ketika manusia lebih mengedepankan rasio, mitos juga masih diciptakan sebagai simbol untuk rujuk sosial. Pada masa perjuangan dan kesulitan, mitos berfungsi sebagai penyedia inspirasi untuk menyelesaikan masalah aktual dan sekaligus sebagai pemberi semangat. Pada masa krisis sosial mitos berfungsi menegakkan solidaritas sosial. Sejalan dengan perkembangan cara berpikir suatu komunitas, mitos-mitos dicoba untuk dikuak dan dijelaskan secara rasional. Namun demikian karena telah lama berfungsi sebagai 'berhala' maka sulit diubah. Sesungguhnya dimensi yang paling sulit adalah karena memang komunitas menghendaki eksistensi mitos itu untuk menjaga keutuhannya. Pengingkaran mitos oleh kelompok tertentu dalam komunitas itu akan melahirkan tuduhan bahwa kelompok itu telah berkianat untuk menjaga integrasi sosial. Gerakan separatis yang merebak di Indonesia misalnya, dipandang sebagai mengkhianati kesepakatan Sumpah Pemuda tahun 1928, meskipun mungkin nenek moyang mereka tak pernah ikut dalam kesepakatan itu. Di sini kita melihat bagaimana even sejarah yang namanya Sumpah Pemuda itu telah dibesar-besarkan dan mengalami proses mitologisasi yang melebihi peristiwanya-itu sendiri. Pemitosan secara sadar terhadap peristiwa sejarah itu terjadi karena secara aktual masyarakat memerlukan justifikasi untuk menegakkan integrasi sosial.

Kebangkitan nasional dengan segala peristiwanya sudah berlalu, tidak mungkin hidup lagi. Ia hanya meninggalkan kenangan bagi tokoh yang masih hidup atau meninggalkan jejak-jejak yang sama sekali tidak lengkap. Jadi kebangkitan nasional sebagai realitas dan aktualitas sudah lenyap. Kini ia menjadi sebuah cerita sejarah, bahkan secara sosiologis ia masih dipercaya sebagai mitos oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Masa kebangkitan nasional masih dipercaya sebagai salah satu tahap yang paling krusial dalam proses formasi Indonesia sebagai sebuah bangsa, artinya tanpa proses itu bangsa Indonesia tak akan pernah terbentuk sebagaimana yang ada sekarang. Kini, sebagai cerita sejarah kritis, kebangkitan nasional terus menjadi salah satu kajian sejarah yang menarik. Sudah barang tentu cerita sejarah ini bisa meruntuhkan mitos itu atau sebaliknya justru memperkuatnya. Namun demikian mitos itu sendiri akan selalu eksis karena memang ia selalu dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia. Apalagi ketika anak bangsa ini sedang mengalami keretakan sosial dan disintegrasi nasional, maka mitos-mitos sangat diperlukan untuk menjadi wahana rujuk sosial dan nasional.

**V. Catatan Akhir: Kebangkitan Nasional II Menuju Indonesia Mandiri**  
 Kembali menyinggung pertanyaan mendasar sebagaimana yang diajukan pada bagian awal dari makalah ini menhapa Kebangkitan Nasional I berhasil dalam mengantarkan kepada proses formasi bangsa Indonesia yang berpuncak pada Proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil, sedangkan Kebangkitan Nasional II tidak banyak mendapat sambutan untuk mencapai tujuan proklamasi yaitu masyarakat adil makmur? Salah satu jawabannya adalah bahwa organisasi-organisasi pergerakan nasional pada waktu itu betul-betul aktual sesuai dengan kondisi masyarakat dan mampu mengartikulasikan dan 'merealisasikan' cita-cita masyarakatnya.

Kondisi aktual masyarakat Indonesia sebagai masyarakat terjajah pada waktu itu adalah masyarakat yang terbelenggu secara politik, tereksplorasi secara ekonomi dan terhina secara kultural. Persoalan yang sangat mendasar sesungguhnya terletak pada kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat menerima itu sebagai nasib (suratan atkdir) yang sudah digariskan oleh Tuhan. Ketidaksadaran ini menjadi masalah yang mendasar dan oleh karena itu persoalan ini menjadi tugas utama bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional untuk membangkitkan kesadaran kebanyakan rakyat. Hal ini telah dengan sangat baik diformulasikan oleh Sukarno dengan memompakan kesadaran bahwa pada masa dulu bangsa Indonesia pernah jaya, sekarang sebagai masyarakat terjajah yang hina, dan masa depan yang gemilang akan dapat dicapai dengan cara harus berjuang melawan kolonialisme. Perlawanan harus dibangkitkan antara pihak 'sini' (Indonesia) dan pihak 'sana' (Belanda).<sup>14</sup> Semangat cita-cita ini dapat dijumpai dalam perjuangan dan aksi yang dilakukan oleh berbagai organisasi seperti SI, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, PNI, dan sebagainya,

Dengan demikian kecerdikan untuk merumuskan persoalan-persoalan aktual dan ketajaman mengartikulasikan keinginan rakyat dan kemampuan serta keberanian untuk merealisasi cita-cita itu merupakan kunci keberhasilan pergerakan nasional. Yang tidak kalah penting adalah membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa mereka dalam keadaan hina sebagai masyarakat terjajah. Hanya kesadaran sebagai masyarakat yang masih terjajah yang akan memberikan semangat untuk merdeka. Di samping itu, salah satu sikap dasar yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi pergerakan nasional pada waktu itu adalah sikap mandiri dalam memperjuangkan dan merealisasikan cita-cita. Artinya, sejak periode awal mereka sudah menyadari bahwa kemerdekaan sebagai bangsa merupakan sesuatu yang tidak akan datang dari 'sana' tetapi harus direbut oleh 'sini'.

Bagaimana dengan kebangkitan nasional sekarang dan yang akan datang? Cukupkah beralasan kalau dikatakan bahwa kebangkitan nasional II sekarang ini tak ada gaung bersambut karena persoalan struktural yang dihadapi bangsa Indonesia berbeda? Yaitu sebagai rakyat terjajah pada masa kebangkitan nasional I dan rakyat merdeka pada kebangkitan nasional II sekarang ini? Apakah masih diperlukan kebangkitan nasional, toh

<sup>14</sup> Lihat Bob Hering, *Soekarno: Founding Father of Indonesia 1901-1945* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 145.

sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka? Dan untuk apa? Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, namun berada di luar cakupan makalah ini.

Kebangkitan nasional II, atau apapun namanya tidak akan bisa mencapai hasil yang bisa melampaui tahapan masyarakat merdeka dalam arti sesungguhnya. Masyarakat adil makmur yang dicita-citakan tak akan tercapai tanpa melalui kemerdekaan. Kemerdekaan itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 hanya sebagai pintu gerbang, sebagai jembatan emas untuk mengawali sebuah perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Melihat kegagalan demi kegagalan yang dialami bangsa Indonesia selama ini, sikap ragu-ragu perlu diajukan: sudahkan kita betul-betul merdeka? Sebagai bangsa memang kita sudah 'merasa merdeka' dari kolonialisme sejak tahun 1945. Akan tetapi apakah betul-betul sudah merdeka? Apakah Indonesia sebagai bangsa ini masih dijajah dengan cara yang lain, misalnya penjajahan ekonomi (dengan hasil: hutang yang menggunung dan penyedotan kekayaan yang tak terelakkan), penjajahan politik dengan kurangnya independensi pemerintah dalam memutuskan kebijaksanaan politik yang berskala luas. Belum lagi rakyat yang belum pernah merdeka karena selalu mendapatkan sikap dholim dari rejim penguasa? Celaknya lagi jika kita tidak merasa bahwa kita belum merdeka. Suatu celakan yang besar jika masih dalam keadaan terjajah tetapi merasa sudah merasa merdeka, karena dengan demikian tak ada lagi semangat untuk menggerakkan kebangkitan nasional, semangat untuk merdeka. Oleh karena itu kebangkitan nasional II (bukan kebangkrutan nasional) sekarang ini harus diarahkan pada perjuangan untuk membebaskan diri dari jaman penjajahan ke-2 (penjajahan model neo-kolonialisme dan penjajahan rejim terhadap rakyat). Hanya dengan cara demikian Indonesia mandiri di masa yang akan datang dapat dicapai. Semoga.